



# **Pemberdayaan Perempuan Disabilitas Melalui Upaya Menanggalkan *Charity Based* di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan**

Nurul Fadhillah S<sup>1\*</sup>, Suriyanto B Mappangara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Sipil Bangunan Gedung, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: [nurul.fadhillah@unm.ac.id](mailto:nurul.fadhillah@unm.ac.id)<sup>1</sup>, [4ndi5uriyanto@gmail.com](mailto:4ndi5uriyanto@gmail.com)<sup>2</sup>

## **INFO ARTIKEL**

Kata kunci:  
*Charity Based*  
Disabilitas  
GEDSI  
Kebijakan  
Perempuan

## **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah dalam bentuk kegiatan konferensi nasional. Kegiatan ini memaparkan hasil riset terkait perempuan disabilitas di Indonesia. Total ada 100 lebih audiens yang bergabung dalam konferensi, 8 periset, dan 4 orang penanggung jawab. Tujuan pengabdian ini adalah meredefinisikan posisi perempuan disabilitas di ruang-ruang publik dan merekomendasikan beberapa kebijakan pemerintah yang harus sensitif GEDSI terkait pemberian keterampilan kerja. Pengabdian dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan Live Youtube. Metode yang digunakan berbentuk presentasi, diskusi, dan tanya jawab, hingga diakhir kegiatan dilakukan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah meluasnya pemahaman masyarakat terkait perempuan disabilitas, kebijakan terkait pemberian pelatihan kerja bagi disabilitas, dan perubahan cara pandang yang tidak lagi melihat satu-satunya solusi bagi perempuan disabilitas adalah berbentuk *charity based*.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## **1. PENDAHULUAN**

Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan sekali mengalami tindakan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Kerentanan ini, menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa terjadi dalam tataran pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, bahkan kesehatan. Belum lagi mereka harus merasakan berbagai bentuk kekerasan. Tidak sampai di situ, ketika dikerucutkan lagi, kerentanan bahkan marginalisasi berlapis ini sering dialami oleh perempuan disabilitas dan anak perempuan disabilitas. Data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak pada 2021 lalu menunjukkan terjadi 987 kasus terhadap anak disabilitas yang 264 kasus di antaranya terjadi kepada anak laki-laki dan 764 kasus kepada anak perempuan. Jenis kekerasan tertinggi dengan jumlah korban terbanyak ada pada kasus kekerasan seksual sebanyak 591 korban (Biro Hukum dan Humas, 2022).

\* Email penulis korespondensi: [nurul.fadhillah@unm.ac.id](mailto:nurul.fadhillah@unm.ac.id)

Tingginya angka kekerasan seksual berpeluang terjadi karena kurangnya kesempatan kepada perempuan disabilitas untuk menunjukkan diri. Mereka kerap kali dibiarkan dan disembunyikan hingga akhirnya terabaikan dan mengalami diskriminasi ganda. Berdasarkan kedudukan, laki-laki disabilitas dipandang berkedudukan lebih tinggi dibanding perempuan disabilitas. Sebab laki-laki disabilitas lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ketidakseimbangan dalam perekonomian inilah yang akhirnya membuat perempuan disabilitas secara perlahan mulai tersingkirkan (Purusotam, 1998). Data terbaru per 2022 dari laporan Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa di Indonesia sendiri, jumlah pekerja laki-laki disabilitas masih mendominasi dengan 445.114 orang dan perempuan disabilitas hanya 275.634 orang (Annur, 2023).

Kurangnya kesempatan bagi perempuan disabilitas dalam mengakses pekerjaan lantas menjadi hal menarik jika ditelusuri lebih jauh dari segi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo. Wajo dipilih karena pengabdian menjadi satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Selatan yang dipilih guna melengkapi keterwakilan suara perempuan disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini dianggap berperan besar dalam menunaikan hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk hidup hingga mendapatkan pekerjaan. Hak ini tidak membedakan disabilitas dari jenis kelamin mereka. Perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan hak tersebut agar memastikan mereka terbebas dari eksploitasi, diskriminasi, dan marginalisasi yang dilakukan oleh masyarakat (Widodo, 2019).

Bekerja sama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, pengabdian lalu terjun ke lapangan dan merekam bagaimana kebijakan pemerintah di Kabupaten Wajo terkait pemberdayaan perempuan disabilitas di daerah tersebut. Sebelumnya pengabdian diberi pelatihan oleh SAPDA dengan berbagai materi, salah satunya mengenal perspektif GEDSI. GEDSI merupakan kepanjangan dari *Gender, Disability, and Social Inclusion* yang digunakan sebagai pendekatan untuk melihat regulasi, kebijakan, hingga menjadi upaya dalam mengadvokasi kelompok-kelompok termarginalkan. Hal ini selaras dengan frasa *no one left behind* yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri pertemuan Asean Leaders Gathering pada 2018 lalu. Selaras dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, Indonesia harus memastikan diri turut andil dalam mengakhiri kemiskinan, termasuk pada laki-laki dan perempuan yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas (Falson, 2021). SAPDA dan periset perempuan dari berbagai daerah di Indonesia pun merangkum penelitian ini menjadi artikel ilmiah populer yang dipublikasikan dalam bentuk buku.

Demi menyebarkan pengetahuan tentang perspektif GEDSI dalam penelitian mengenai perempuan disabilitas, SAPDA lantas membuat konferensi nasional dengan berbagai sesi. Pengabdian hadir pada sesi ketiga untuk tema "Pemberdayaan Perempuan Disabilitas dan Kebijakan". Tema ini menampilkan 4 peneliti dengan pemaparan yang berbeda-beda dengan payung tema yang tetap sama. Konferensi nasional yang dilakukan secara daring saat pandemi meningkat di Indonesia pada 2020 lalu ini menghadirkan aktivitas perempuan, periset, perempuan disabilitas, hingga perwakilan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Konferensi nasional ini sekaligus menjadi ruang untuk perempuan disabilitas bersuara dan mengutarakan apa yang selama ini menjadi keresahannya terkait tema.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman yang meluas kepada masyarakat terkait posisi perempuan disabilitas dan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan oleh

pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas perempuan yang bergerak dari arah *charity based* menuju pengembangan kompetensi lewat pelatihan kerja bagi perempuan disabilitas. Selama ini pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah lebih menyasar masyarakat umum dan tidak mengkhusus kepada perempuan disabilitas. Hal ini jadi penting mengingat yang dibutuhkan oleh perempuan disabilitas adalah keberlanjutan hidup dengan kemampuan yang mereka miliki.

Pendahuluan harus memberikan konteks atau latar belakang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Jelaskan mengapa kegiatan ini penting dan relevan dalam konteks masyarakat atau komunitas tertentu. Berikan alasan atau justifikasi mengapa kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan. Jelaskan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau komunitas jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan atau diberikan solusi yang tepat. Cara termudah untuk menulis artikel Anda agar sesuai dengan format penulisan Jurnal adalah dengan copy paste template ini. Penulisan istilah asing harus ditulis dengan huruf miring.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Konferensi ini diadakan pada 20 Oktober 2020. Tahapan yang dilaksanakan mulai dari mempersiapkan merangkum jurnal dan artikel populer, menyatukannya dalam bentuk presentasi, memaparkannya dalam kegiatan konferensi, mengadakan tanya jawab dengan peserta konferensi, dan terakhir menarik kesimpulan dari semua yang telah dibahas sebelumnya.



**Gambar 1.** Rangkaian Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Ada beberapa tahapan lain yang juga dilakukan jauh sebelum konferensi ini dimulai. Pertama, pelatihan intensif terkait riset advokasi berbasis gender disabilitas yang dilaksanakan oleh SAPDA. Kedua, mengkaji topik yang akan diangkat dalam riset. Topik di sini menjadi penting karena setiap peserta pelatihan mewakili daerah yang berbeda di Indonesia. Ketiga, mendiskusikan perihal pengambilan data di lapangan dengan mentor masing-masing. Keempat, turun ke Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan untuk mencari data dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung. Pihak yang dimaksud mulai dari pihak pemerintah dan perempuan disabilitas. Kelima, menulis hasil riset yang dilakukan menjadi sebuah jurnal. Keenam, mendiskusikannya dengan pakar di bidang hukum yang sudah disediakan oleh SAPDA. Ketujuh, melakukan revisi jurnal dan menyerahkannya kepada SAPDA. Kedelapan, menulis artikel ilmiah populer yang akan dibukukan bersama penulis lainnya. Kesembilan, menyiapkan materi untuk dipresentasikan dalam konferensi. Terakhir, melakukan konferensi nasional yang disaksikan oleh masyarakat, pemerintah, disabilitas, dan pihak-pihak lain yang memperjuangkan isu yang sama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Inisialisasi Awal Kegiatan

Kegiatan konferensi nasional ini melalui diskusi yang cukup panjang dengan pihak SAPDA. Sebelum pandemi, konferensi ini direncanakan untuk diadakan secara luring di Yogyakarta. Situasi yang tidak memungkinkan membuat SAPDA sebagai penyelenggara dan para peneliti memutuskan untuk membuat konferensinya secara daring untuk menghindari kerumunan.

Pelaksanaan konferensi diawali dengan diberikannya pembekalan kepada 8 perempuan (termasuk pengabdian) yang tersebar dari beberapa daerah di Indonesia. Perempuan yang dipilih sebagai peneliti adalah mereka yang bergerak dalam bidang disabilitas, gender, dan kesetaraan hak perempuan. Setengah dari peserta merupakan disabilitas dan sisanya lagi merupakan periset dalam isu tersebut. Kegiatan pembekalan diadakan di daerah Bantul dengan menyewa sebuah rumah untuk ditinggali peserta sekaligus digunakan sebagai tempat untuk menerima materi pembekalan. Materi diberikan mulai pukul 09.00 WIB pagi setelah para peserta sarapan dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Waktu istirahat dimanfaatkan peserta dengan beribadah, makan siang, dan bercengkrama sembari membahas isu masing-masing. Beberapa dari peserta menceritakan awal mula kondisi mereka seperti sekarang. Tujuannya agar semua peserta yang hadir memiliki kepekaan dan informasi baru, bahwa semua orang berpeluang untuk menjadi disabilitas. Sebab teman-teman disabilitas yang menjadi peserta juga banyak yang dulu kondisinya masih seperti biasa.

Ada banyak agenda selama hampir 2 minggu pelatihan intensif tersebut terlaksana. Para peserta tidak hanya dibekali dengan ilmu tentang penelitian berperspektif GEDSI. Lebih dari itu, peserta pun diminta turun langsung ke lapangan untuk uji coba mewawancarai beberapa keluarga yang memiliki anak disabilitas. Tujuannya agar para peserta mulai membiasakan diri untuk memiliki persiapan yang matang sebelum bertemu dengan caregiver (keluarga dari disabilitas) dan ketika berhadapan dengan disabilitasnya langsung. Peserta dibagi dalam beberapa tim dan disebar ke berbagai wilayah di Yogyakarta, bertemu dengan mitra SAPDA, dan sebagai luarannya peserta diminta membuat materi presentasi. Hasil dari wawancara tersebut lantas dipresentasikan di depan peserta yang lain.

### 3.2 Persiapan Kegiatan

Pada tahanan persiapan ini, para peserta sudah memiliki bekal pemahaman tentang GEDSI dan pendekatan untuk wawancara dengan informan sesuai prosedur. Peserta lalu pulang ke daerah masing-masing dan mulai turun ke lapangan untuk mewawancarai informan mereka yang sebenarnya. Sekadar tambahan, saat masih mengikuti pelatihan, peserta juga diajak ke Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada untuk mendengarkan materi langsung dari mentor. Materi ini digunakan sebagai tambahan metode dan pisau analisis saat mengerjakan proyek penelitian ini.



**Gambar 2.** Para Peneliti dan Pembicara pada Konferensi Nasional

Pengabdian mengambil data di BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan untuk mencocokkannya dengan data wawancara kepada informan yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan perempuan disabilitas. Setelah data terkumpul, pengabdian lalu membuat jurnal dan artikel ilmiah yang nantinya akan dipaparkan dalam konferensi. Revisi pun dilakukan secara

daring, mengingat semua peneliti pulang ke daerah masing-masing dan mentor tetap berada di Yogyakarta. Pengabdian mendapatkan revisi minor dengan penajaman kembali pada beberapa bagian yang dinilai masih lemah. Alhasil, pengabdian kembali melakukan FGD dengan pihak pemerintah guna mengonfirmasi beberapa hal.

Revisi selesai dan semua periset, termasuk pengabdian, diminta berkumpul kembali di Yogyakarta untuk membicarakan persiapan konverensi. Semua periset berkumpul di Kantor Yayasan SAPDA, Gang Empu Gandring III UH V No. 770 XX, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pembicaraan ini berlangsung alot karena awalnya konferensi direncanakan diadakan luring di Yogyakarta dan berada pada tataran internasional dengan menghadirkan banyak pakar terkait GEDSI. Namun saat itu pandemi dan tidak memungkinkan SAPDA mengadakan kerumunan dengan menghadirkan orang-orang dari negara lain. Keputusan yang diambil, konferensi dibuat tingkat nasional saja dengan memanfaatkan aplikasi Zoom.



Gambar 3. Flyer Konferensi Nasional Sesi Pemberdayaan Perempuan dan Kebijakan

### 3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan konferensi nasional ini dimulai dengan pemaparan materi dari SAPDA dan beberapa pihak yang sebelumnya memiliki riset serupa. Setelah itu ada sambutan dari perwakilan pemerintah dan teman-teman perempuan disabilitas. Sambutan dan pemberian materi tuntas, acara selanjutnya disampaikan oleh moderator bahwa peserta konferensi boleh memilih *breakout room* mana yang ingin mereka masuki. Moderator menyampaikan tema-tema dari *breakout room*.

- A) Tema pertama adalah *parenting* dan anak. Ada beberapa periset yang masuk dalam sesi ini. Periset-periset tersebut membahas mulai dari urgensi pola asuh demokratis untuk anak disabilitas, pola asuh ideal untuk anak disabilitas, pentingnya pola asuh yang tepat untuk anak disabilitas, tantangan *homeschooling* bagi anak disabilitas ganda, dan PAUD inklusif: menuju *society 5.0*.
- B) Tema kedua adalah pemberdayaan perempuan dan kebijakan. Beberapa periset yang masuk di sini menjabarkan hasil riset mereka. Mulai dari menanggalkan *charity based*

pemberdayaan perempuan disabilitas dari pengabdian, menguji aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Bandung, melawan representasi disabilitas dengan *make up*, mempertanyakan efektivitas pemberdayaan perempuan disabilitas di Kediri, dan terakhir ada KSM Harapan Mulia sebagai pilar pemberdayaan disabilitas.

- C) Tema ketiga adalah hak kesehatan seksual, reproduksi, dan kekerasan. Beberapa riset yang terkait mulai dari dilema adat pada perjodohan disabilitas, lampu merah kekerasan seksual pada disabilitas, dan mendambakan peradilan aksesibel terhadap anak disabilitas.
- D) Tema keempat adalah pendidikan dan regulasi politik ekonomi. Riset yang berkenaan mulai dari pendidikan inklusi: masih jauh panggang dari api, gaya komunikasi kanan-kiri disabilitas netra, perencanaan desa menihilkan perempuan disabilitas, dan eforia politik mengabaikan penyandang disabilitas.



Gambar 4. Dokumentasi Diskusi Bersama Peserta

Sesi pengabdian ada pada sesi ketiga. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, pengabdian telah selesai mempresentasikan materi dan masuk pada sesi diskusi dengan audiens. Sesi ini cukup menarik karena salah satu audiens berasal dari kantor pemerintahan yang sering menangani program pemberian pelatihan kerja kepada masyarakat. Diskusi berlangsung cukup serius dengan memaparkan beberapa data dan temuan di lapangan yang oleh teman-teman perempuan disabilitas dijadikan soal kurangnya pelatihan kerja yang menyesuaikan dengan kondisi mereka.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum maksimal karena masih kurangnya akses terhadap pelatihan kerja yang mengkhususkan perempuan disabilitas. Selama ini, pelatihan kerja hanya disediakan untuk mereka yang baru lulus sekolah dan pengangguran.

Menurut riset pengabdian di Wajo, Sulawesi Selatan, beberapa perempuan disabilitas yang diwawancarai meminta adanya kursus keterampilan yang bisa mereka jadikan modal bekerja. Sebab tanpa itu, pekerjaan yang bisa mereka akses adalah pekerjaan dengan upah yang tidak layak dengan tenaga yang dikuras habis-habisan. Informasi tentang ini lebih lanjut tertuang dalam artikel populer yang dibukukan oleh SAPDA.



Gambar 1. Bab Artikel Ilmiah Populer yang dipresentasikan Pengabdian pada Konferensi Nasional

### 3.4 Evaluasi Kegiatan

Konferensi nasional berlangsung dengan maksimal. Beberapa perspektif dihadirkan dalam ruang-ruang maya yang menyoroti soal kebijakan pemerintah, kebutuhan dari perempuan disabilitas, dan pentingnya hal ini dijabarkan dalam dunia akademik dari kacamata periset. SAPDA sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang ini mengarahkan kepada para audiens untuk menghubungi SAPDA untuk konsultasi jika ada keluarga yang memiliki disabilitas. SAPDA bersedia memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sebelumnya telah disusun dan siap diaplikasikan kepada semua orang tua atau guru-guru yang memiliki anak atau murid disabilitas.



Gambar 2. Sertifikat Konferensi Nasional

Guna mengukur apakah tujuan dari konferensi nasional ini tercapai, SAPDA memulai diskusi dengan audiens setelah mereka kembali ke *main room* Zoom dan keluar dari *breakout room* per sesi tadi. SAPDA juga menyebarkan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form untuk diisi oleh audiens sebelum mendapatkan sertifikat Hasilnya, secara umum audiens merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik lagi dalam mendefinisikan perempuan disabilitas. Ragam disabilitas pun sudah mereka ketahui, mulai disabilitas fisik dan mental. Audiens juga merasa penting membuka diskusi tentang disabilitas ini lebih dalam. Banyak dari mereka yang menyarankan agar kegiatannya dibuat luring dan dilangsungkan secara intensif dalam beberapa hari.

Kesimpulannya, audiens kini tidak lagi melihat perempuan disabilitas sebagai orang yang harusnya dirumahkan karena dianggap aib oleh keluarga. Mereka harus berdaya dengan cara mereka sendiri. Peluang dan kesempatan dari pemerintah selaku pemangku kebijakan bisa dimaksimalkan dengan aturan-aturan yang sekiranya sensitif gender dan berperspektif GEDSI. Sebab dengan begini, wacana-wacana atas perempuan disabilitas bisa diredefinisi dari sosok yang lemah menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Mereka tidak perlu dikasihani, mereka cukup diberi peluang mengasah keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negara ini.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa hasil dari pelaksanaan konferensi nasional ini yang bisa disimpulkan. (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perempuan disabilitas. (2) Memberikan pandangan kepada pemerintah terkait rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. (3) Mengenalkan perspektif GEDSI sebagai kacamata baru dalam perumusan kebijakan. (4) Lahirnya peluang-peluang riset dalam dunia disabilitas yang tidak lagi menempatkan perempuan disabilitas

sebagai pihak yang tidak berdaya. (5) Menumbuhkan rasa percaya diri kepada perempuan disabilitas bahwa mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka punya.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada Yayasan SAPDA Yogyakarta, mentor dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan teman-teman periset dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, menjadikan Indonesia sebagai negara inklusif yang peka gender dan disabilitas. Memanusiakan manusia dan memberi peluang kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Semoga ke depannya konferensi semacam ini tidak berhenti hanya karena rasa abai yang dipelihara. Semoga api semacam ini tetap dijaga hangatnya dan semoga usaha ini menular dalam jiwa kita semua.

## **REFERENSI**

- Annur, C., Mutia. (2023). *Jumlah Pekerja Disabilitas Indonesia Meningkat pada 2022, Didominasi Laki-laki*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki>
- Biro Hukum dan Humas. (2022). *Kemenpppa: Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>
- Falson, J. (2021). *Mengupas Keadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Studi Implementasi Kebijakan Layanan pada KPKNL Ternate)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14110/Mengupas-Keadilan-Gender-Disabilitas-dan-Inklusi-Sosial-Studi-Implementasi-Kebijakan-Layanan-pada-KPKNL-Ternate.html>
- Purusotam, N. (1998). *Between Cimplice and Resitance: Woman and The Middle Class Way of Life in Singapore*. In *Gender and Power in Affluent Asia* (1st ed.). Routledge.
- Widodo, B. (2019). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>